

POLITISI SENIOR DI DPRD KOTA PEKANBARU TAHUN 2014–2019

Oleh : Bobby Rizky Ananda

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

, Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the context of agenda indonesia unresolved is he also resistance to the mushrooming in every state institution. The axis of the powers of the state still tersentralistik against he also. is One example is in kontestasi leadership elections in indonesia that he also plays an important role in the system of rule is informed and versed in mengelolah axis, existing powers while a young person is considered as objects of a system that function and role gerontokrasi kaula young gerontokrasi. have stalled in the system We just look back now in general political parties in indonesia were controlled by politisi-politisi old. With the gerontokrasi in a political party this is an embryo that breeds kepartaian oligarchy , the system of rule produced by a handful of party elite party that is small .Not only in the political gerontokrasi arrived but also the economic and cultural system .Problems related to research is as follows: what formation he also in the council pekanbaru 2014-2019 years .Aimed at described and knows he also formations in the council pekanbaru 2014-2019 years . Research approach used in this research is a qualitative approach. In this study researchers used. interview The research results it produces the conclusion that senior politicians in the council pekanbaru also have an influence on government, in pekanbaru so they can be said as senior politician who can influence policy in the government pekanbaru

Key Words: Senior Politician , Gerontokrasi

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai jalan terbaik untuk melibatkan semua warga negara dalam kehidupan politik. Sistem ini merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, masa depan serta untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif. Demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam sebuah negara demokrasi. Demokrasi paling sedikit memiliki lima standar didalamnya yaitu partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, pengawasan agenda, dan pencakupan orang dewasa .

Dalam pembangunan kehidupan berdemokrasi seyogyanya rakyat Indonesia dan elit politik mengucapkan terimakasih kepada salah seorang Funding Fathers kita yaitu Mohammad Hatta.

Dengan tidak mengecilkan peran dan pemikiran tokoh-tokoh yang lain, lihat saja bahwa Mohammad Hatta peletak dasar Demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Dalam mengembangkan pemikiran Demokrasinya yang sering kita sebut demokrasi rakyat, beliau tidak terjebak terhadap pola demokrasi ala barat yang sangat liberal dan kapitalistik, karena demokrasi menurut Mohammad Hatta adalah demokrasi yang berpihak terhadap kepentingan rakyat bawah (proletar) dan bukan terhadap penguasa (borjuis).

Demokrasi adalah suatu bagian dari proses kebudayaan karena ia merupakan kekuatan yang menggerakkan proses membentuk sosok baru dari suatu konsep kekuasaan, yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat. Pada kenyataannya, kebudayaan tidak pernah sepenuhnya memberikan jalan ke arah kebudayaan yang benar-benar baru, tidak peduli betapa kuatnya dampak inovasi, akan selalu ada golongan atau kelompok-kelompok yang menggunakan budaya “gaya” lama untuk melanggengkan sesuatu. Dalam hal ini sebuah kekuasaan. Pada gilirannya, kedinamisan dalam budaya berdemokrasi menjadi tersumbat, terhalang oleh tirai tua “bergaya lama” yaitu sering disebut dengan politisi senior.

Dalam konteks Indonesia agenda yang belum terselesaikan

adalah perlawanan terhadap politisi senior yang menjamur di setiap lembaga negara. Sumbu kekuasaan negara masih saja tersentralistik terhadap politisi senior yang ada. Salah satu contoh adalah dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan di Indonesia bahwa politisi senior memainkan peranan yang penting dalam merebut sistem kekuasaan karena dianggap paham dan berpengalaman dalam mengelolah sumbu kekuasaan yang ada, sedangkan orang muda hanya dianggap sebagai objek dari sebuah sistem gerontokrasi sehingga fungsi dan peranan kaula muda mandek dalam sistem gerontokrasi. Kita lihat sekarang pada umumnya partai-partai politik yang ada di Indonesia selalu dikendalikan oleh politisi-politisi tua. Dengan adanya gerontokrasi di partai politik inilah embrio yang melahirkan oligarki kepartaian, yakni sistem kekuasaan partai dihasilkan oleh segelintir kecil elit partai yang ada. Tidak hanya di ranah politik tetapi gerontokrasi mewabah juga hingga sampai sistem ekonomi dan budaya.

Paskah reformasi bahwa banyak politisi muda yang tampil dalam kacah perpolitikan di Indonesia namun tetap saja sentral politik paling strategis selalu saja dikendalikan sepenuhnya oleh sistem gerontokrasi. Celakanya generasi politisi muda tersebut banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran dan pola pikir perilaku politisi tua dan bukan dari pemikiran brilian generasi muda tersebut. Ini sangat berbeda ketika jaman kemerdekaan dimana politisi muda memainkan peranan yang penting dalam merumuskan dan memformulasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan

uraian fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengusung judul penelitian sebagai berikut:

Politisi Senior Di DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2014–2019.

Pada hakekatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang perlu dicari jawabannya, atau segala bentuk kesulitan yang datang tentunya harus ada kegiatan yang memecahkannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimana formasi Politisi Senior di DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui formasi Politisi Senior di DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019

Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang di lakukan adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dan cakrawala berpikir bagi penulis.
2. Untuk menambah pengetahuan bagi Masyarakat luas khususnya masyarakat Pekanbaru.
3. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Konsep Teori

1. Teori Elit Politik

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang

yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbale balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa elite adalah prosuk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antarelite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diteljemakan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya .

2. Kekuasaan

Di dalam ilmu politik dikenal istilah “kekuasaan” sebagai suatu definisi dan konsep pokok dari ilmu politik. Keduanya melekat bersamaan dan sering kali dalam pembahasan tertentu, masing-masing darinya tidak bisa berdiri sendiri. Konsep kekuasaan ini dilihat sebagai hubungan antara dua atau lebih kesatuan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak (pihak menguasai dan pihak dikuasai) untuk keberlangsungan kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan tersebut memiliki sifat hubungan relasional.

Merujuk pada definisinya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan tersebut. Pelaku dari praktek kekuasaan meliputi individu, sekelompok orang, atau suatu kolektivitas.

Metode Penelitian

a.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan wilayah kerja pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari – Maret 2019.

b. Informan Penelitian

adapun informan dalam penelitian ini adalah H. Sahril, SH Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Drs. Nasruddin Nasution, MA Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H.Darnil, SH Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Drs. H. Tarmizi Muhammad Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Herwan Nasri, ST Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Peneliti memakai wawancara mengingat dengan mengandalkan observasi saja data yang dikumpulkan belum maksimal.

d.Jenis dan Sumber Data

adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

e.Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, setelah reformasi kurang lebih 15 tahun, dirasakan sudah banyak kemajuan. Demokrasi berkembang dengan cepat, dengan sistem pers yang bebas dan sistem multipartai. Terlaksananya pemilu yang langsung, baik pemilihan wakil rakyat di lembaga legislatif, presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota. Banyak hal yang telah dilakukan oleh bangsa ini dalam melakukan perubahan, kendati belum sepenuhnya dapat mengikis fenomena gerontokrasi. Hal ini dapat terlihat dari masih kuatnya dominasi figur-figur senior yang mengendalikan roda partai, bahkan dijadikan ikon partai. Kondisi inilah yang membuat kultur di partai-partai politik kita tidak banyak berubah sekalipun tuntutan reformasi sudah digulirkan. Akibatnya, skandal-skandal yang melibatkan aktor-aktor politik kita tetap terjadi, yang menunjukkan kultur yang lebih positif sebagaimana seharusnya terbawa oleh alam pikir anak-anak muda yang masih idealis, tidak terbangun.

Politisi Senior di DPRD Kota Pekanbaru membatasi akses untuk orang-orang yang masih muda pada kekuasaan; bahkan ditutup. Di dalam gerontokrasi ini, orang tua mengambil posisi sebagai subjeknya sementara orang yang masih muda adalah sebagai objek; atau orang tua sebagai penikmat dan yang muda sebagai korban akibat dari tertutupnya akses. Banyak masyarakat, komunitas, dan

organisasi yang menggunakan cara seperti ini, tanpa kecuali di Indonesia. Banyak organisasi yang membiarkan diri dikendalikan oleh orang yang sudah tua. Kesempatan memimpin lebih terbuka untuk yang sudah berumur. Bahkan sampai dibuat sistem sedemikian rupa, sehingga yang tua tetap sebagai pemegang rezim, sedangkan yang masih muda dipinggirkan terlebih dahulu. Sumber kekuasaan DPRD Kota Pekanbaru masih tersentralistik terhadap Politisi Senior yang ada. Salah satu contoh adalah dalam kontestasi pemilihan kepemimpinan di Psetiap fraksi partainya bahwa politisi senior memainkan peranan yang penting dalam merebut sistem kekuasaan karena dianggap paham dan berpengalaman dalam mengelolah sumbu kekuasaan yang ada, sedangkan orang muda hanya dianggap sebagai objek dari sebuah sistem gerontokrasi sehingga fungsi dan peranan kaula muda mandek dalam sistem politisi senior. Kita lihat sekarang pada umumnya partai-partai politik yang ada di Indonesia selalu dikendalikan oleh politisi-politisi tua. Dengan adanya gerontokrasi di partai politik inilah embrio yang melahirkan oligarki kepartaian bahkan pemerintah, yakni sistem kekuasaan partai dihasilkan oleh segelintir kecil elit partai yang ada begitu sebaliknya. Tidak hanya di ranah politik tetapi politisi senior mewabah juga hingga sampai sistem ekonomi dan budaya. Kalau sistem politisi senior tetap saja dipertahankan dalam sistem demokrasi yang penuh dengan toleransi di khawatirkan ini akan menghambat kreativitas orang-orang muda untuk tampil dalam konstelasi pemilihan kepemimpinan.

Paskah reformasi bahwa banyak politisi muda yang tampil dalam kawah perpolitikan yang ada di lembaga Legislatif yaitu DPRD Kota Pekanbaru namun tetap saja sentral politik paling strategis selalu saja dikendalikan sepenuhnya oleh politisi senior. Celakanya generasi politisi senior tersebut banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran dan pola pikir perilaku politisi orde baru dan bukan dari pemikiran brilian generasi mud. Ini sangat berbeda ketika jaman kemerdekaan dimana politisi senior memainkan peranan yang penting dalam merumuskan dan memformulasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan berdebat panjang dalam tataran ideologi untuk merumuskan sistem negara yang sesuai dengan falsafah pancasila.

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elite diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.

Potret nyata politisi senior di Indonesia khususnya di DPRD Kota

Pekanbaru harus dipandang serius, karena politisi senior tanpa didasari demokrasi yang kokoh akan sangat mudah memunculkan otokrasi. Otokrasi baik secara lokal atau nasional bisa memunculkan perlawanan yang bersifat eksplosif yang bisa merusak sendi-sendi demokrasi. Politik dinasti ini bisa dilihat baik di tingkat nasional maupun lokal.

Dengan demikian aspek dalam DPRD yang dapat dipengaruhi oleh politisi senior terutama dalam lembaga legislatif Kota Pekanbaru adalah dari sisi pemimpin daerah, halini dapat dilihat bahwa dengan usia pemimpin DPRD Kota Pekanbaru yang telah lanjut dan tergolong kedalam gerontokrasi, mengingat sangat berpengaruhnya posisi politisi senior, mulai dari eksekutif hingga legislative, dari segi aspek pembuatan kebijakan dan keputusan di DPRD kota Pekanbaru, telah di pengaruhi oleh gerontokrasi pemerintah, yang dimana politisi senior dalam memainkan peranya sebagai pembuat kebijakan, namun antar kaum gerontokrasi pemerintah tetap berkoordinasi dalam pemberian saran serta masukan terhadap jalanya roda pemerintahan. Dengan demikian, jagat politik Indonesia didominasi para politisi berusia di atas 60 tahun—bahkan banyak yang sudah lebih dekat ke 70 tahun. Mereka sudah malang melintang dalam kancah politik Indonesia—sebagian sejak masa Orde Baru melintasi masa Reformasi yang kini sudah masuk paruh kedua dasawarsa kedua. Mereka yang masih bersedia menjadi pemimpin puncak partai dalam usia yang sudah akhir 60-an tahun dalam bahasa lebih sopan disebut sebagai ”politisi senior”.

Namun, dalam istilah sedikit peyoratif meminjam ungkapan yang lazim dalam politik Amerika Serikat mereka aging politicians, politisi lanjut usia atau politisi yang sudah dimakan umur. Dalam kacamata ilmu politik, terminologi yang lebih umum digunakan adalah gerontokrasi: dari kosakata Yunani geront, berarti 'orang tua' atau 'orang lanjut usia'. Geront + kratia (kekuasaan) berarti keadaan politik dan pemerintahan di mana yang berkuasa orang-orang yang secara signifikan lebih tua dibandingkan rata-rata populasi dewasa.

Sementara dalam partai politik di Kota Pekanbaru, juga dapat dikatakan bahwa gerontokrasi masih memegang peranan penting. Dengan demikian DPRD kota Pekanbaru dan Partai Politik sangat menjunjung tinggi masukan atau arahan yang mereka minta dari para politisi senior, namun masukan tersebut, tidak dapat mengubah atau mempengaruhi suatu kebijakan yang akan dibuat. Lain halnya dengan politisi senior itu sendiri adalah orang-orang sebagai pembuat kebijakan. Sebagaimana yang kita lihat dan ketahui, berdasarkan konsep usia, di DPRD Kota Pekanbaru merupakan politisi senior di pemerintahan dan bahkan politisi senior di partainya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembuat kebijakan di dalam DPRD Kota Pekanbaru merupakan politisi senior. Sedangkan berdasarkan Data yang diperoleh politisi senior yang juga merupakan anggota legislatif/ DPRD Kota Pekanbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat

ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Politisi senior di DPRD Kota Pekanbaru yang juga memiliki pengaruh di dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai politisi senior yang dapat mempengaruhi kebijakan di pemerintahan Kota Pekanbaru. Terdapat politisi senior di pemerintahan kota Pekanbaru dan dalam di DPRD Kota Pekanbaru, yang dapat dipengaruhi oleh politisi senior gerontokrasi terutama dalam pemerintah Kota Pekanbaru adalah dari sisi pemimpin daerah, hal ini dapat dilihat bahwa dengan usia pemimpin DPR Kota Pekanbaru yang telah lanjut dan tergolong kedalam gerontokrasi, mengingat sangat berpengaruhnya posisi politisi senior di DPRD Kota Pekanbaru, hingga lembaga legislative dari segi aspek pembuatan kebijakan dan keputusan di pemerintah kota Pekanbaru, telah di pengaruh oleh politisi senior, yang dimana politisi senior dalam DPRD Kota Pekanbaru sebagai pembuat kebijakan, namun antar politisi senior tetap berkoordinasi dalam pemberian saran serta masukan terhadap jalannya roda pemerintah.

B. Saran

Masyarakat harus dapat mengawasi jalannya roda pemerintah sehingga dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang baik sesuai dengan ideologi Pancasila

Kaum Muda harusnya lebih dapat berperan aktif dan berkecimpung dalam pemerintahan dan partai politik.

Pemerintah hendaknya juga turut memperhatikan tanggapan dan masukan kaum muda dalam menentukan kebijakan, sehingga

terjadi keseimbangan dalam pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Alfian, M. Alfian. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

_____. Kekuatan Pemimpin (Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik?). Jakarta: Kubah Ilmu. 2012.

_____, Pemikiran Politik dan Pembangunan Politik di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Al Muchtar Suwarma, 2009, Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia, Bandung, Gelar Pustaka Mandiri

Andrain, Charles F. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1992.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Budiardjo Mariam, 2011, Dasar-dasar Ilmu politik, Jakarta, Gramedia Pustaka

Coleman S. James. 2008. Dasar-Dasar Teori Sosial. Nusa Media: Bandung

Damsar. 2011. Pengantar Sosiologi Pendidikan. Kencana, Jakarta.

Efendi, Onong Uchjana. Kepemimpinan dan Komunikasi. Bandung: Mandra Maju. 1992.

Goodman, Douglas J., and George Ritzer. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Harahap, Asri. Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada. Jakarta: Cidesindo. 2005.

Hayati, Sri., dan Ahmad Yani. Geografi Politik. Bandung: Refika Aditama. 2007

Imam Hidayat, 2009, Teori-Teori Politik, Malang: SETARA press

Komarudin Sahid, 2011. Memahami Sosiologi Politik, . Bandung: CV Pustaka Setia

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

Rudini, H. Atas Nama Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. 1994.

Ramlan Surbakti. 1984. Memahami Ilmu Politik. Surabaya: Universitas Air Langga

Rafael Raga Maran, 2001, Pengantar Sosiologi Politik jakarta : Rieneka Cipta Usman, Husaini dan Purnomo. 2011. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sanit, Arbi. Reformasi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2009.

b. Jurnal dan Skripsi :

Adib, Mohammad. 2012. Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu. E-Jurnal BioKultur, Vol.I/No.2/Juli-Desember

Karnanta, Kukuh Yudha. 2013. Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. Jurnal Poetika, Vol. 1 No.1.

c. Internet :

<http://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/mengenal-gerontokrasi/>

<http://kbbi.web.id/partai>

<https://nasional.sindonews.com/read/997794/18/melawan-gerontokrasi1430876673>

<http://id.beritasatu.com/home/politik-indonesia-menganut-gerontokrasi/113121>